

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Tata Kelola Kolaboratif**

##### **2.1.1 Teori Collaborative Governance**

Menurut Ansell dan Gash (2008), tata kelola kolaboratif didefinisikan sebagai pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif. Teori ini menekankan pentingnya proses kolaboratif dalam mengatasi permasalahan publik yang kompleks.

##### **2.1.2 Model Collaborative Governance**

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengembangkan kerangka kerja kolaboratif yang terdiri dari tiga komponen utama: pertama, kondisi penggerak (drivers) yang memicu kolaborasi; kedua, kondisi kontekstual yang mempengaruhi kolaborasi; ketiga, proses kolaboratif itu sendiri yang mencakup prinsip kesamaan, kapasitas bersama, dan aksi kolaboratif.

##### **2.1.3 Penerapan dalam Sektor Pariwisata**

Dalam konteks pariwisata, tata kelola kolaboratif menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas pemangku kepentingan yang terlibat. Menurut Bramwell dan Lane (2011), kolaborasi dalam pariwisata diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dan menciptakan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.

## **2.2 Otonomi Desa Adat di Bali**

### **2.2.1 Landasan Hukum**

Berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, desa adat diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi ini mencakup kewenangan dalam pengelolaan sumber daya budaya, termasuk situs-situs spiritual seperti Pura Tirta Empul.

### **2.2.2 Peran Desa Adat dalam Pengelolaan Pariwisata**

Desa adat memiliki peran strategis dalam pengelolaan destinasi wisata, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual dan budaya. Menurut Picard (1996), desa adat berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai tradisional sekaligus pengelola aktivitas pariwisata yang berkembang di wilayahnya.

### **2.2.3 Sistem Dual Leadership**

Konsep dual leadership di Bali merujuk pada adanya dua sistem pemerintahan yang berjalan paralel: pemerintah formal dan pemerintah adat. Menurut Warren (1993), sistem ini menciptakan dinamika kekuasaan yang unik dimana kedua entitas harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan.

## **2.3 Pemulihan Ekonomi Pariwisata Pasca Pandemi**

### **2.3.1 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pariwisata**

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan disrupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sektor pariwisata global. Menurut UNWTO (2020), pandemi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan internasional sebesar 74% pada tahun 2020, dengan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat yang bergantung pada pariwisata.

### **2.3.2 Strategi Pemulihan Pariwisata**

Bappenas (2021) dalam "Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru" menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pemulihan pariwisata. Strategi ini mencakup penerapan protokol kesehatan, dukungan likuiditas bagi pelaku usaha, pengembangan kapasitas SDM, dan revitalisasi destinasi wisata.

### **2.3.3 Community-Based Tourism dalam Pemulihan**

Konsep Community-Based Tourism (CBT) yang dikemukakan oleh Baskoro (2008) menjadi relevan dalam konteks pemulihan pasca pandemi. CBT menekankan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan pariwisata, dengan memanfaatkan aset lokal sebagai daya tarik wisata.

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

### **2.4.1 Studi tentang Collaborative Governance di Bali**

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek tata kelola kolaboratif dan pariwisata di Bali. Penelitian oleh Ardika et al. (2019) berjudul "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Ubud" mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, swasta, dan masyarakat mampu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek pengelolaan destinasi dalam kondisi normal, bukan pada konteks pemulihan pasca krisis.

Studi oleh Putra dan Pitana (2020) tentang "Peran Desa Adat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Gianyar" menemukan bahwa desa adat memiliki peran signifikan dalam menjaga keberlanjutan

pariwisata budaya. Akan tetapi, penelitian ini tidak secara spesifik membahas model kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam situasi pemulihan ekonomi.

Penelitian Suardana et al. (2021) mengenai "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pariwisata Bali dan Strategi Adaptasi" memberikan gambaran komprehensif tentang dampak pandemi, namun kurang menyentuh aspek tata kelola kolaboratif antara pemerintah daerah dan desa adat dalam proses pemulihan.

#### **2.4.2 Relevansi dan Perbedaan dengan Penelitian Ini**

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu:

1. Kontekstualisasi Pemulihan Pasca Krisis
  - Penelitian Terdahulu: Fokus pada pengelolaan pariwisata dalam kondisi normal
  - Penelitian Ini: Spesifik membahas tata kelola kolaboratif dalam konteks pemulihan pasca pandemi COVID
2. Kompleksitas Aktor
  - Penelitian Terdahulu: Umumnya membahas kolaborasi antara pemerintah dan swasta
  - Penelitian Ini: Menekankan kolaborasi unik antara pemerintah formal (daerah) dan pemerintah tradisional (desa adat)
3. Integrasi Kearifan Lokal
  - Penelitian Terdahulu: Cenderung menganggap kearifan lokal sebagai variabel terpisah
  - Penelitian Ini: Mengintegrasikan kearifan lokal sebagai bagian integral dari model tata kelola kolaboratif
4. Pendekatan Teoritis
  - Penelitian Terdahulu: Sering menggunakan pendekatan governance konvensional

- Penelitian Ini: Mengembangkan model hybrid yang mengintegrasikan teori collaborative governance dengan nilai-nilai lokal Bali

#### 5. Fokus Temporal

- Penelitian Terdahulu: Analisis cross-sectional pada satu titik waktu
- Penelitian Ini: Melacak dinamika kolaborasi selama proses pemulihan (2022-2024)

